

## Penerapan *Blue Economy* Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Wisata Hutan Mangrove di Kota Kendari

Ni Putu Via Anjani<sup>1)</sup>, Enrino Kurnia Dinova<sup>2)</sup>, Refalina<sup>3)</sup>, Diamond Limbong<sup>4)</sup>

<sup>1234</sup>Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Kendari, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>[viaanjani672@gmail.com](mailto:viaanjani672@gmail.com)

<sup>2</sup>[enrinoenrino@gmail.com](mailto:enrinoenrino@gmail.com), <sup>3</sup>[refalina0902@gmail.com](mailto:refalina0902@gmail.com), <sup>4</sup>[diamondlimbong@gmail.com](mailto:diamondlimbong@gmail.com)

Article Information

Submit: 29-11-2025

Revised: 20-12-2025

Accepted: 31-01-2026

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Blue Economy serta dampaknya terhadap pendapatan sektor wisata hutan mangrove di Kota Kendari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap masyarakat pesisir, pelaku usaha wisata mangrove, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata hutan mangrove di Kota Kendari telah menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip ekonomi biru, seperti pelestarian ekosistem mangrove dan pengelolaan limbah usaha, yang berkontribusi terhadap peningkatan dan stabilitas pendapatan pelaku usaha serta memberikan dampak sosial ekonomi positif bagi masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai praktik Blue Economy yang tumbuh secara implisit di tingkat lokal, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan kebijakan pengelolaan wisata berbasis ekosistem sebagai strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah pesisir.

**Kata Kunci:** Blue Economy, Kota Kendari, Pendapatan Usaha, Pariwisata Berkelanjutan, Wisata Hutan Mangrove

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of Blue Economy principles and their impact on income in the mangrove forest tourism sector in Kendari City. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews with mangrove tourism business actors, the Kendari City Environmental Agency, and coastal community members. Data were analyzed thematically through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that mangrove forest tourism management in Kendari City has applied environmentally sustainable practices, including mangrove ecosystem conservation and business waste management, which contribute to increased and more stable business income and generate positive socio-economic impacts for coastal communities through job creation. This study provides empirical evidence on Blue Economy practices that have emerged implicitly at the local level, while also emphasizing the importance of strengthening ecosystem-based tourism management policies as a strategy for sustainable coastal economic development.*

**Keywords:** Blue Economy, Mangrove Forest Tourism, Business Income, Sustainable Tourism, Kendari City

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainability economy*) menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam konteks wisata pesisir laut, hal ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Ekonomi berkelanjutan mendorong kegiatan wisata yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pengembangan wisata pesisir yang berorientasi pada keberlanjutan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga sebagai pelindung alami terhadap abrasi dan habitat biota laut.

Konsep *Blue Economy* hadir sebagai bentuk konkret dari pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan. *Blue Economy* menitikberatkan pada optimalisasi potensi laut dan pesisir untuk pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem. Dalam konteks wisata pesisir laut, pendekatan ini fokus pada pemanfaatan jasa ekosistem secara efisien seperti pengembangan wisata bahari serta konservasi pesisir oleh masyarakat. Prinsip dasar *Blue Economy* menekankan

kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya laut secara bijak. Dengan penerapan *Blue Economy* diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan pesisir.

Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi *Blue Economy*. Pariwisata pesisir laut tidak hanya berfungsi sebagai sarana wisata tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang inklusif. Pengelolaan wisata yang mengutamakan konservasi dan partisipasi masyarakat dapat menciptakan siklus ekonomi yang sehat, di mana peningkatan kunjungan wisata berdampak langsung pada pertumbuhan usaha kecil seperti kuliner laut. Pariwisata berkelanjutan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan daerah pesisir laut serta melestarikan biota laut.

Namun, wilayah pesisir Kota Kendari masih menghadapi sejumlah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan pengelolaan. Beberapa kawasan pesisir mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran dan kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Meningkatnya aktivitas wisata di pesisir laut seperti di Taman Mangrove dan Kampung Bakau menunjukkan adanya peluang ekonomi yang besar bila dikelola dengan prinsip *Blue Economy*. Fenomena ini mengindikasikan perlunya pendekatan baru yang mampu menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan masyarakat dengan kelestarian ekosistem laut.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan konsep *Blue Economy* dalam sektor wisata pesisir dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Menurut penelitian (Ardhi Sahjaya et al., 2025) penerapan prinsip blue economy di kawasan pesisir secara berkelanjutan telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus mempertahankan stabilitas ekosistem laut melalui pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik. Sementara itu, penelitian lain menyatakan bahwa penerapan blue economy dalam pariwisata pesisir memerlukan peran aktif pemerintah daerah serta keterlibatan masyarakat lokal agar pengelolaan wisata bahari dapat berjalan secara berkelanjutan (Andrea et al., 2025). Temuan-temuan ini memperkuat relevansi penelitian tentang penerapan *Blue Economy* di Kota Kendari.

Kota Kendari memiliki potensi wisata pesisir laut yang besar dengan karakteristik alam yang unik dan letak geografis yang strategis. Keindahan teluk, taman mangrove, dan kekayaan biota laut menjadi daya tarik wisata yang menjanjikan. Namun, tantangan yang dihadapi cukup besar seperti rendahnya kesadaran lingkungan, infrastruktur wisata yang belum memadai, serta lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan. Penguatan penerapan *Blue Economy* di wilayah pesisir Kendari dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan pendapatan sektor wisata sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip *Blue Economy* berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan sektor wisata pesisir laut di Kota Kendari. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana penerapan prinsip *Blue Economy* dalam pengelolaan wisata hutan mangrove di Kota Kendari serta dampaknya terhadap pendapatan pelaku usaha dan masyarakat pesisir. Mengingat masih terbatasnya kajian empiris yang secara spesifik mengkaji praktik *Blue Economy* pada wisata mangrove di tingkat lokal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Blue Economy* dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan sektor wisata hutan mangrove di Kota Kendari. Fokus analisis diarahkan pada aspek pelestarian ekosistem, pengelolaan usaha wisata, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat pesisir.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip *Blue Economy* dalam meningkatkan pendapatan sektor wisata bahari di Kota Kendari. Data diperoleh melalui wawancara dari dua kelompok

informan utama yaitu, aparat Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari dan masyarakat pelaku usaha di wilayah pesisir. Aparat pemerintah dipilih karena memiliki kewenangan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan wilayah pesisir. Sedangkan pelaku usaha dipilih karena merupakan pelaku ekonomi utama yang secara langsung terlibat dalam aktivitas wisata. Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan Kesimpulan terhadap tema-tema yang muncul dari hasil wawancara. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan *Blue Economy* dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan sektor wisata bahari di Kota Kendari. Selain itu, peran informan juga dapat membantu peneliti dalam menemukan tema dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian. Berikut ini adalah narasumber pada penelitian ini:

**Tabel 1. Narasumber Penelitian**

No.	Nama Narasumber	Jabatan Narasumber
	Arnaldo, S.Pd, MH	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari
	Ibu Rosita	Manajer Wisata Hutan Mangrove Byeropa Resort and Cafe
	Muh Anjas Saputra	Supervisor Rumah Makan Kampung Bakau
	Junaedi	Masyarakat Pesisir

#### a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di dua tempat yang berbeda yang pertama yaitu di

- Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari yang berlokasi di Jl Balai Kota III No.60, Pondambea, Kec.Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Wawancara ini di lakukan pada tanggal 19 November 2025
- Tempat wisata hutan mangrove yaitu Byeropa Resort and café yang berlokasi Jl. Tapak Kuda No.21, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Wawancara ini di lakukan pada tanggal 02 Desember 2025
- Rumah makan Kampung Bakau yang berlokasi di Andonuhu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Wawancara ini di lakukan pada tanggal 04 Desember 2025

#### b. Jenis dan Sumber Data

Jenis serta sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data primer yang didapat dari hasil interview dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari dan Manajer wisata mangrove Byeropa Resort and Café.

#### c. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek untuk penelitian ini adalah pelaku usaha di Kawasan hutan mangrove di kota kendari.

#### d. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari hasil observasi, komunikasi personal serta studi dokumentasi dan literatur.

#### e. Tahapan Pengolahan Data

Langkah-langkah pengolahan data yaitu, dimulai dengan mengumpulkan data dengan melakukan survei terlebih dahulu, kemudian mengolah data penelitian, dan diakhiri dengan penyimpulan dari data yang telah didapatkan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipilih karena tujuan penelitian tidak hanya untuk melihat dampak penerapan Blue Ekonomi terhadap pendapatan sektor wisata hutan mangrove, tetapi juga untuk memahami proses, praktik

pengelolaan, serta pandangan para pelaku yang terlibat di dalamnya. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan pengecekan silang terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, pelaku usaha wisata mangrove, dan Masyarakat pesisir, serta membandingkan dengan hasil observasi lapangan dan dokumentasi yang relevan. Melalui cara ini, data yang digunakan dalam penelitian dinilai memiliki tingkat keterpercayaan yang memadai untuk mendukung temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Prinsip Blue Economy dalam Pengelolaan Wisata Hutan Mangrove Kota Kendari**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha wisata mangrove di Kota Kendari, yaitu Byeropa Resort and Café dan Rumah Makan Kampung Bakau, diketahui bahwa pengembangan usaha wisata mangrove dilatarbelakangi oleh pemanfaatan potensi ekosistem mangrove sebagai daya tarik wisata berbasis alam. Kawasan mangrove dipandang tidak hanya sebagai ruang ekologis, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang bernilai apabila dikelola secara berkelanjutan.

Dalam praktik pengelolannya, pelaku usaha telah melakukan berbagai upaya pelestarian lingkungan, antara lain pemeliharaan vegetasi mangrove, penanaman bibit secara berkala, pengelolaan limbah usaha yang terkontrol, serta penerapan larangan pembuangan sampah ke laut. Meskipun pelaku usaha belum memahami konsep Blue Economy secara teoritis, praktik pengelolaan yang diterapkan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi biru.

Secara konseptual, Blue Economy merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan dengan tetap menjaga fungsi ekologis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pauli, 2010). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Blue Economy dapat berlangsung secara implisit melalui praktik lokal, sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa praktik ekonomi berkelanjutan sering berkembang dari pengalaman lapangan dan kebutuhan ekonomi masyarakat (Béné et al., 2016).

### **Dampak Penerapan Prinsip Keberlanjutan terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Wisata Mangrove**

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara pengelolaan lingkungan berbasis keberlanjutan dan pendapatan pelaku usaha wisata mangrove. Pada awal pengelolaan, Byeropa Resort and Café mengalami fluktuasi pendapatan yang signifikan, terutama ketika aspek pelestarian lingkungan kurang mendapat perhatian. Kondisi ekosistem mangrove yang menurun berdampak langsung pada berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan, sehingga omzet usaha mengalami penurunan yang cukup drastis. Namun, setelah pengelola kembali menerapkan praktik pelestarian mangrove dan melakukan inovasi usaha yang ramah lingkungan, kondisi ekosistem membaik dan pendapatan usaha kembali meningkat hingga melampaui Rp100 juta per bulan.

Sementara itu, Rumah Makan Kampung Bakau menunjukkan pola yang berbeda. Sejak awal pengelolaan, pelaku usaha secara konsisten menjaga kelestarian ekosistem mangrove di sekitarnya. Sebelum menerapkan prinsip keberlanjutan secara konsisten, peningkatan pendapatan belum terlihat signifikan. Namun, setelah upaya pelestarian dilakukan secara berkelanjutan, pendapatan usaha meningkat secara relatif stabil seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Pelaku usaha menyadari bahwa kondisi mangrove yang sehat merupakan daya tarik utama dalam mempertahankan dan meningkatkan minat wisatawan.

Dalam perspektif Blue Economy, mangrove dipandang sebagai natural capital yang memiliki nilai ekonomi jangka panjang apabila dikelola secara berkelanjutan (Barrie & Liebender-Luc, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian ekosistem mangrove tidak

menghambat aktivitas ekonomi, melainkan berkontribusi positif terhadap penguatan daya saing usaha wisata dan peningkatan pendapatan pelaku usaha.

### **Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Implementasi *Blue Economy***

Hasil wawancara dengan pihak DLHK Kota Kendari menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan ekosistem mangrove. DLHK menjalankan fungsi pengawasan, rehabilitasi mangrove, penyusunan regulasi, serta pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat pesisir agar kegiatan wisata mangrove tetap berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan pemahaman pelaku usaha di lapangan. Pelaku usaha belum sepenuhnya memahami konsep *Blue Economy* secara formal, meskipun telah menerapkan praktik yang sejalan dengan konsep tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan dari pemerintah daerah agar penerapan *Blue Economy* dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi *Blue Economy*, sejalan dengan pandangan UNEP (2015) yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.

### **Implikasi Sosial Ekonomi Penerapan *Blue Economy* bagi Masyarakat Pesisir**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan wisata hutan mangrove memberikan dampak sosial ekonomi yang positif bagi masyarakat pesisir di Kota Kendari. Usaha wisata mangrove membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, baik sebagai tenaga parkir, pelayan, maupun staf pendukung lainnya. Dampak ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi, termasuk biaya pendidikan. Dalam kerangka *Blue Economy*, manfaat ekonomi yang diperoleh tidak hanya terpusat pada pelaku usaha, tetapi juga menyebar kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusivitas dalam ekonomi biru yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan (Pauli, 2010) (UNEP, 2015).

### **Tantangan dalam Penerapan *Blue Economy* pada Wisata Hutan Mangrove Kota Kendari**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Blue Economy* pada wisata hutan mangrove di Kota Kendari masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan implementatif. Meskipun pelaku usaha telah menjalankan praktik yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan, penerapan tersebut belum didukung oleh pemahaman konseptual dan kerangka kebijakan yang terintegrasi secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi pelaku usaha terhadap konsep *Blue Economy*. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha wisata mangrove belum memahami istilah maupun prinsip ekonomi biru secara formal, meskipun telah menerapkan praktik pelestarian lingkungan seperti penanaman mangrove, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik lapangan dan pemahaman teoritis sebagai dasar perencanaan usaha jangka panjang.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan peran pemerintah daerah dalam aspek edukasi dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Walaupun DLHK Kota Kendari telah menjalankan fungsi pengawasan dan penyusunan kebijakan lingkungan, transfer pengetahuan mengenai *Blue Economy* kepada pelaku usaha masih belum optimal. Akibatnya, penerapan ekonomi biru lebih bersifat inisiatif individual dibandingkan hasil dari sistem kebijakan yang terstruktur.

Selain itu, tekanan ekonomi jangka pendek juga menjadi tantangan dalam penerapan Blue Economy. Pelaku usaha dihadapkan pada dilema antara menjaga kelestarian lingkungan dan mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek. Tanpa dukungan insentif, panduan teknis, dan kepastian regulasi, prinsip keberlanjutan berpotensi terabaikan ketika usaha menghadapi penurunan pendapatan atau peningkatan biaya operasional. Dalam kerangka teori, Blue Economy menuntut sinergi antara keberlanjutan ekologis, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial (Pauli, 2010) (Barrie & Liebender-Luc, 2016). Dengan demikian, tantangan utama dalam penerapannya tidak terletak pada ketiadaan praktik keberlanjutan, melainkan pada belum terbangunnya sistem pendukung yang mampu mengintegrasikan praktik tersebut ke dalam kerangka pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

### **Peluang Penerapan *Blue Economy* pada Wisata Hutan Mangrove Kota Kendari**

Meskipun penerapan Blue Economy pada wisata hutan mangrove di Kota Kendari masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi pelaku usaha dan belum optimalnya peran pemerintah daerah, kondisi ini sekaligus membuka peluang strategis bagi penguatan implementasi ekonomi biru ke depan.

Salah satu peluang utama terletak pada peningkatan literasi pelaku usaha terhadap konsep dan prinsip Blue Economy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai praktik pengelolaan berkelanjutan telah dijalankan secara intuitif oleh pelaku usaha wisata mangrove, meskipun belum didukung oleh pemahaman konseptual yang memadai. Kondisi ini menjadi peluang strategis karena melalui program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang tepat, praktik-praktik tersebut dapat disistematisasi menjadi model usaha wisata berbasis Blue Economy yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang.

Peluang berikutnya berkaitan dengan penguatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan enabler. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari yang selama ini menitikberatkan pada fungsi pengawasan dapat diperluas ke arah edukasi dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, kebijakan lingkungan tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga transformatif dalam mendorong inovasi usaha ramah lingkungan dan pertumbuhan ekonomi pesisir yang berkelanjutan. Dalam perspektif teori, Blue Economy menekankan pemanfaatan sumber daya pesisir sebagai natural capital yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk menciptakan nilai ekonomi jangka panjang (Pauli, 2010) (Barrie & Liebender-Luc, 2016). Oleh karena itu, wisata hutan mangrove di Kota Kendari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai model wisata pesisir berbasis Blue Economy apabila tantangan literasi dan kelembagaan dapat diatasi secara sistematis.

### **Sintesis Temuan dalam Kerangka *Blue Economy***

Sintesis temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Blue Economy pada wisata hutan mangrove di Kota Kendari telah berlangsung secara praktik di tingkat lapangan, namun belum terbangun secara kuat dalam kerangka konseptual dan kelembagaan. Pelaku usaha wisata mangrove telah menerapkan berbagai praktik pengelolaan yang selaras dengan prinsip ekonomi biru, seperti upaya pelestarian ekosistem mangrove, pengelolaan limbah usaha, serta pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan sebagai daya tarik utama kegiatan wisata. Namun demikian, praktik-praktik tersebut masih dijalankan berdasarkan pengalaman empiris, kebiasaan lokal, dan kebutuhan ekonomi jangka pendek, bukan atas pemahaman teoritis yang sistematis mengenai konsep dan prinsip Blue Economy. Kondisi ini menyebabkan penerapan ekonomi biru belum terintegrasi secara optimal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan usaha wisata mangrove, sehingga keberlanjutannya masih sangat bergantung pada inisiatif individual pelaku usaha dan belum didukung oleh sistem kelembagaan yang terstruktur.

Temuan penelitian juga mengungkap bahwa kelestarian ekosistem mangrove memiliki hubungan yang erat dengan keberlanjutan pendapatan pelaku usaha wisata. Ekosistem mangrove berfungsi sebagai *natural capital* yang tidak hanya menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi penentu daya tarik wisata dan stabilitas ekonomi usaha. Dengan demikian, pelestarian mangrove tidak dapat dipisahkan dari strategi peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha wisata pesisir.

Di sisi lain, peran pemerintah daerah dan masyarakat pesisir menunjukkan adanya fondasi sosial dan kelembagaan yang berpotensi mendukung penerapan Blue Economy pada wisata hutan mangrove di Kota Kendari. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari telah menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, dan perlindungan lingkungan sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem mangrove, sementara masyarakat pesisir telah memperoleh manfaat ekonomi secara langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan dalam aktivitas wisata. Namun demikian, keterpaduan peran antaraktor tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka Blue Economy yang terencana, terstruktur, dan sistematis. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang kuat serta belum adanya strategi bersama yang mengaitkan tujuan ekonomi, sosial, dan ekologis menyebabkan potensi kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendorong pembangunan pesisir yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Oleh karena itu, sintesis temuan ini menegaskan bahwa wisata hutan mangrove di Kota Kendari berada pada fase transisi menuju penerapan *Blue Economy* yang lebih optimal. Keberhasilan pengembangan ke depan sangat bergantung pada penguatan literasi pelaku usaha, peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator, serta integrasi kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis dalam satu model pengelolaan wisata mangrove yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Blue Economy* pada wisata hutan mangrove di Kota Kendari telah berlangsung secara praktik melalui pengelolaan ekosistem mangrove yang berorientasi pada keberlanjutan, meskipun belum didukung oleh pemahaman konseptual yang memadai dari pelaku usaha dan kerangka kebijakan yang terintegrasi. Pelestarian mangrove terbukti berkontribusi terhadap peningkatan dan stabilitas pendapatan pelaku usaha wisata serta memberikan dampak sosial ekonomi positif bagi masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan kerja. Namun, rendahnya literasi ekonomi biru dan terbatasnya peran pemerintah dalam edukasi dan pendampingan menjadi tantangan dalam optimalisasi penerapan Blue Economy. Oleh karena itu, wisata hutan mangrove di Kota Kendari memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai model wisata pesisir berbasis Blue Economy yang berkelanjutan dan inklusif apabila didukung oleh penguatan kapasitas pelaku usaha, peran aktif pemerintah daerah, serta kolaborasi yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Temuan penelitian ini menunjukkan penerapan *Blue Economy* pada wisata hutan mangrove di Kota Kendari perlu diperkuat melalui peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip ekonomi biru agar praktik pengelolaan yang telah berjalan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, khususnya DLHK Kota Kendari, diharapkan dapat meningkatkan peran pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha dan masyarakat pesisir. Selain itu, pengelolaan wisata mangrove perlu terus diarahkan pada pendekatan yang menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat pesisir.

## SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan lokasi penelitian serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar memperoleh hasil yang lebih

komprehensif. Bagi tempat penelitian, pengelola wisata hutan mangrove di Kota Kendari diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip Blue Economy secara terstruktur dengan dukungan pembinaan dan kebijakan berkelanjutan dari pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhi Sahjaya, R., Yusliandi, R., & Siregar, L. D. L. (2025). *Tinjauan literatur: Peranan blue economy dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui sumber daya perikanan di Sumatera Utara*. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 17–27. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v3i2.1590>
- Béné, C., Arthur, R., Norbury, H., Allison, E. H., Beveridge, M., Bush, S., & Williams, M. (2016). Contribution of fisheries and aquaculture to food security and poverty reduction: Assessing the current evidence. *World Development*, 79, 177–196. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.007>
- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25. <https://doi.org/10.1080/14616689908721291>
- Chambers, R. (1995). *Poverty and livelihoods: Whose reality counts?* Brighton: Institute of Development Studies. <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://collegepublishing.sagepub.com/products/research-design-4-237357>
- Fauziah, A. R., Priansyah, T. A., Ferreira, P. D. C., & Pandin, M. Y. R. (2024). Penerapan Blue Economy Pada Pendapatan Sektor Wisata Hutan Mangrove Surabaya. *AKUNTOTEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 16(1), 109–118. <https://doi.org/10.31253/aktek.v16i1.3126>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). *Blue growth initiative: Partnering for sustainable fisheries and aquaculture*. Rome: FAO. <http://www.fao.org/3/i8512en/I8512EN.pdf>
- Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 agenda and the managerial ecology of sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1044–1060. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1560456>
- Islam, M. M., & Bhuiyan, M. A. H. (2018). Tourism as a driver of sustainable coastal development: A case study of Bangladesh. *Ocean & Coastal Management*, 160, 18–27. <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284419722>
- Jasuli, A., et al. (2025). Optimalisasi Blue Economy melalui ekowisata mangrove dalam mendukung keberlanjutan ekonomi. *Jurnal ISO*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2781>
- Jeurissen, R. John Elkington, *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. *Journal of Business Ethics* 23, 229–231 (2000). <https://doi.org/10.1023/A:1006129603978>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019). *Kebijakan ekonomi biru dalam pembangunan kelautan dan perikanan*. Jakarta: KKP RI. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/03/2023.03.13-Kebijakan-Ekonomi-Biru-KKP.pdf>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://lccn.loc.gov/2018034217>
- Nasution, R. K. A., et al. (2023). Keberlanjutan wisata mangrove Silau Laut dalam perspektif ekologi dan pariwisata. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/jempper.v4i1.3903>
- OECD. (2016). *The ocean economy in 2030*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264251724-en>



- Pauli, G. (2010). *The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*. Taos, NM: Paradigm Publications. [https://books.google.com/books/about/The Blue Economy.html?id=aJ3HZD1H7ZsC](https://books.google.com/books/about/The+Blue+Economy.html?id=aJ3HZD1H7ZsC)
- Santos, R., et al. (2020). Linking coastal ecosystem services to human well-being: Insights from the blue economy. *Marine Policy*, 119, 104061. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104061>
- Spalding, M. D., Ruffo, S., Lacambra, C., Meliane, I., Hale, L. Z., Shepard, C. C., & Beck, M. W. (2014). The role of ecosystems in coastal protection: Adapting to climate change and coastal hazards. *Ocean & Coastal Management*, 90, 50–57. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.09.007>
- Syifauddin, M., & Kurniawan, E. (2025). Pengembangan sustainable tourism pada masyarakat multikultur di Karimunjawa dengan pendekatan Blue Economy. *Integralistik*, 36(2). <https://doi.org/10.15294/integralistik.v36i2.29397>
- U. Agni Andrea, G., Nisa, F. L., & Pakpahan, R. (2025). Implementasi blue economy pada sektor pariwisata pesisir atau bahari di Pantai Dalegan – Gresik. *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia*, 7(2), 10300. <https://doi.org/10.37253/altasia.v7i2.10300>
- United Nations Environment Programme. (2015). *Blue economy: Sharing success stories to inspire change*. Nairobi: UNEP. <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9844>
- United Nations World Tourism Organization. (2018). *Tourism for development*. Madrid: UNWTO. <https://doi.org/10.18111/9789284419746>
- Upa, K. A., & Tidore, M. D. (2024). Upaya menjaga Labuan Bajo sebagai sustainable tourism melalui prinsip sustainability dan Blue Economy. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(8), 21–30. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v5i8.7330>
- World Bank. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources*. Washington, DC: World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/26843>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Thousand Oaks, CA: Sage. <https://sl1nk.com/ONp81>